

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Di dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif yang mendeskripsikan tentang Peran Bakohumas Provinsi Jawa Timur dalam membangun keterbukaan informasi publik di Jawa Timur. Peran Bakohumas adalah sebagai penyebarluaskan informasi dan mensosialisasikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah kepada publik. Badan koordinasi humas pemerintah (Bakohumas) juga berperan sebagai forum koordinasi antar praktisi humas pemerintah dan kerjasama antar unit kerja bidang kehumasan di Lembaga Pemerintahan. Praktisi humas di Lembaga Pemerintah melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif dan efisien untuk menciptakan keterbukaan informasi publik antara Lembaga pemerintah dan publiknya. Sistem pelayanan informasi melalui wadah Bakohumas merupakan bagian dari tuntutan jaman Iptek dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik. Alasan kenapa mengambil rumusan masalah pada perumusan masalah yang pertama yakni; bagaimana bakohumas provinsi jawa timur mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, yang dianggap penting bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana badan publik pemerintah Bakohumas dalam keterbukaan informasi publik di Jawa Timur.

Bakohumas adalah badan publik pemerintah yang bersifat nonstruktural yang merupakan wadah forum koordinasi antar praktisi humas pemerintah dan forum kerjasama antar unit kerja bidang kehumasan di pemerintahan provinsi jawa timur. Bentuk koordinasi bakohumas yakni dengan mengadakan pertemuan rutin sekitar 2 atau 3 bulan sekali yang dinamakan Forum Bakohumas, dan bentuk koordinasi bakohumas juga lewat media sosial untuk

saling berkomunikasi antar anggota bakohumas provinsi jawa timur. Alasan pada pengambilan rumusan masalah pada perumusan masalah yang kedua yaitu: bagaimana koordinasi bakohumas dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, perumusan masalah ini untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan Bakohumas Provinsi Jawa Timur kepada anggotanya untuk aktif dalam memberikan informasi tentang pemerintahan daerah dan mewujudkan keterbukaan informasi publik di Prov. Jawa Timur.

**a. Langkah Seleksi Berita Bakohumas Provinsi Jawa Timur**

Penelitian ini diawali dengan mencari pemberitaan bakohumas alasannya karena pemberitaan ini adalah representasi kerja dari bakohumas. Di Provinsi Jawa Timur ada 38 Kabupaten dan Kota pemberitaan bakohumas ini sekaligus untuk melihat apakah humas di masing-masing Kabupaten dan Kota cukup terbuka atau tidak dalam keterbukaan informasi publik maka dari itu penting untuk melihat pemberitaannya yang ada di *website* bakohumas.

Fokus pemberitaan yang di ambil adalah satu bulan yaitu pada bulan januari 2019 selama bulan januari 2019 ada 202 pemberitaan yang masuk dari 5 kabupaten yang mengirimkan berita di *website* bakohumas. Masing-masing beritanya yang *pertama* dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebanyak 65 item berita, yang *kedua* dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebanyak 35 item berita, yang *ketiga* dari Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak 11 item berita, yang *keempat* dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebanyak 48 item berita, yang *kelima* dari Pemerintah Kabupaten Lumajang sebanyak 43 item berita.

Seleksi berita yang dipilih dari 5 kabupaten yang aktif mengirimkan berita di *website* Bakohumas Provinsi Jawa Timur selama bulan januari 2019 kemudian selanjutnya dari 5 kabupaten yang aktif memberikan informasi pada bulan januari 2019 di ambil satu untuk di analisa dan dipilih pada hari yang sama pengirimannya yakni pada hari jum'at tanggal 4

januari 2019 dengan judul berita yang di analisa, yang *pertama* dari Pemkab Probolinggo dengan judul berita; “Bakorwil V Jember pimpin rakor penanganan bencana alam Tiris”, yang *kedua* dari Pemkab Pasuruan dengan judul berita; “Mereduksi resiko bencana, KIM Kabupaten Pasuruan intens informasikan kesiapsiagaan bencana ke warga”, yang *ketiga* dari Pemkab Gresik dengan judul berita; “Awali aktivitas tahun 2019 dengan istighosah qubro”, yang *keempat* dari Pemkab Ponorogo dengan judul berita; “Jokowi serahkan sertifikat tanah wakaf di Ponorogo”, yang *kelima* dari Pemkab Lumajang dengan judul berita; “Pemkab komitmen lakukan revolusi birokrasi untuk tingkatkan kinerja ASN di Lumajang.

**b. Langkah Observasi Bakohumas Provinsi Jawa Timur**

Observasi yang dilakukan peneliti pada bulan september sampai oktober 2018 ketika masa PPM (praktik profesi mahasiswa) di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bertugas dibidang Komunikasi Publik dan dibidang Bakohumas Provinsi Jawa Timur. Peran peneliti disini melakukan praktek kerja sebagai admin Bakohumas sekaligus melaksanakan observasi melihat bagaimana proses kerja dari Bakohumas dan mengambil data berita di *website* Bakohumas Provinsi Jawa Timur untuk dijadikan bahan penelitian.

Proses kerja Bakohumas adalah pemberitaan-pemberitaan tentang pemerintahan di provinsi jawa timur semua akan di awali dari proses pembuatan berita dari wartawan/jurnalis yang bekerja dipemerintahan kemudian proses selanjutnya adalah proses pengiriman berita, proses pengiriman berita dilakukan oleh OPD Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan admin Bakohumas Provinsi Jawa Timur sebagai penerima berita dari OPD Perangkat Daerah setelah berita masuk ke admin bakohumas tugas admin bakohumas adalah melakukan proses editing jika terjadi kesalahan dalam proses penulisan berita kemudian proses terakhir yang

dilakukan admin bakohumas adalah melakukan upload berita di website bakohumas.

**c. Langkah Wawancara Bakohumas Provinsi Jawa Timur**

Langkah wawancara yang dilakukan adalah proses wawancara dengan diawali menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan tentang Bakohumas Provinsi Jawa Timur, lalu kemudian proses selanjutnya dilakukan dengan membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber yang akan diwawancarai. Membuat janji dengan narasumber dengan dihubungi lewat media sosial yaitu whatsapp serta menepakati hari untuk wawancara.

Kemudian setelah sudah di sepakati hari yang ditentukan untuk wawancara kemudian dilaksanakan proses wawancara pada hari senin tanggal 1 juli 2019 bersama Bpk Eko Setiawan, M.Med.Kom yang berdinis di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang menjabat sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan pengurus pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur. Wawancara dilakukan kepada Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik karena yang mengurus bidang komunikasi publik serta bertugas sebagai admin website pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur.

## **B. Hasil Penelitian**

### **a. Hasil Observasi Lapangan**

#### **1. Proses Pembuatan Berita Bakohumas Provinsi Jawa Timur**

Proses pembuatan berita Bakohumas dibuat oleh dua sumber jurnalis yaitu yang pertama dari jurnalis bakohumas yang berada di kantor Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan yang kedua yaitu dari jurnalis yang berada di daerah kabupaten atau kota di wilayah provinsi Jawa Timur. Jurnalis bakohumas yang berada di kantor Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur bertugas meliput dan membuat naskah berita jika ada acara agenda pemerintahan yang diselenggarakan Ibukota Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan jurnalis yang berada di daerah kabupaten atau kota bertugas membuat berita tentang pemerintahan daerah yang berada di kabupaten atau kota. Tema berita yang dibuat meliputi pembangunan pemerintahan daerah, sosial, dan ekonomi. Proses pembuatan berita yang dilakukan oleh jurnalis yang berada di kabupaten atau kota, naskah berita yang sudah dibuat jurnalis kemudian dikirimkan ke humas pemerintah daerah (Pemda) kemudian humas pemerintah daerah berkoordinasi dengan admin Bakohumas Jatim dan mengirimkan naskah berita ke admin Bakohumas Provinsi Jawa Timur.

#### **2. Proses Pengiriman Berita Bakohumas Provinsi Jawa Timur**

Proses pengiriman berita dilakukan oleh humas pemerintah daerah (Pemda) yang naskah beritanya dibuat dari seorang jurnalis, naskah berita yang sudah jadi akan di kirimkan ke admin Bakohumas Provinsi Jawa Timur. Informasi atau berita di media bakohumas provinsi Jawa Timur berasal dari anggotanya, proses pengiriman beritanya yaitu anggota bakohumas yang berada di pemerintah kabupaten atau pemerintah kota membuat berita setelah berita dari pemkab/pemkot di upload ke media yang berada di pemkab/pemkot

kemudian pemkab/pemkot mengirimkan berita ke media bakohumas provinsi jawa timur.

### **3. Proses Penerimaan Berita Bakohumas Provinsi Jawa Timur**

Proses penerimaan berita dilakukan oleh admin Bakohumas Provinsi Jawa Timur dan humas pemerintah daerah (Pemda) yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Admin Bakohumas Provinsi Jawa Timur menerima berita dari humas pemerintah daerah sedangkan humas pemerintah daerah menerima berita dari seorang jurnalis yang telah melakukan liputan berita dan membuat naskah beritanya.

Proses penerimaan berita bakohumas provinsi jawa timur dilakukan setiap hari. Bakohumas provinsi jawa timur yang sebagai admin bakohumas akan menunggu berita yang masuk di media *website* atau media bakohumas seperti media twitter bakohumas. Tugas admin bakohumas yaitu mengelola media informasi bakohumas dan menerima informasi atau berita yang masuk.

### **4. Proses Edit Berita Bakohumas Provinsi Jawa Timur**

Proses editing berita dilakukan oleh admin Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang berperan sebagai editor menyunting isi berita. Editor adalah orang yang bekerja menyeleksi dan memperbaiki naskah berita jika terjadi kesalahan pada penggunaan huruf besar, tanda baca, singkatan, dan memperbaiki kalimat yang tidak benar

Berita yang masuk pada media *website* Bakohumas akan melalui proses edit berita oleh admin bakohumas jawa timur. Pemberitaan pada media informasi bakohumas jawa timur yaitu berasal dari anggota bakohumas provinsi jawa timur yang telah dikirim ke admin bakohumas kemudian di lakukan proses editing oleh admin Bakohumas jika ada kesalahan dalam penulisan berita dan di cek beritanya berasal dari sumber instansi mana, sebelum beritanya di upload atau dipublikasikan ke media bakohumas provinsi jawa timur.

Gambaran kerja tugas editor admin bakohumas provinsi jawa timur adalah mengoreksi dan memperbaiki naskah berita yang akan dipublikasikan di *website* Bakohumas Provinsi Jawa Timur. Pada proses penulisan naskah pemberitaan, kemudian melewati tahap perencanaan berita (*news planning*), peliputan peristiwa pada lokasi berita (*news gathering*), editing menjadi bagian dari aktivitas pengolahan hasil berita (*news processing*) tujuan pengeditan berita Bakohumas Provinsi Jawa Timur adalah untuk memperbaiki naskah berita supaya lebih mudah di baca dan di pahami pembaca, dan selanjutnya penulisan bahan untuk berita yang dijadikan naskah berita (*news writing*) kemudian di upload ke media informasi.

#### **5. Proses Upload Berita Bakohumas Provinsi Jawa Timur**

Proses upload berita bakohumas dilakukan oleh admin bakohumas provinsi jawa timur. pengupload an berita dilakukan setiap hari pada jam kerja kantor Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur yang berperan dan bertugas pada bagian admin Bakohumas untuk mempublikasikan berita ke media *website* dan media sosial Bakohumas. Admin bakohumas akan menerima berita dari anggotanya kemudian akan di cek dan di edit jika jika ada kesalahan dalam penulisan beritanya setelah melalui proses pengeditan oleh admin bakohumas kemudian admin bakohumas mengupload ke media bakohumas dan di jadikan headline pada hari tersebut.

#### **b. Hasil Observasi Pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur**

Pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang telah di lakukan peneliti selama proses observasi dan penelitian adalah jumlah berita yang masuk dalam satu bulan pada bulan januari 2019 yaitu ada 202 pemberitaan dan hasil temuan peneliti adalah tidak semua anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang berada di Kabupaten atau Kota aktif dalam keterbukaan informasi publik. Temuan yang didapat pada bulan januari 2019 hanya ada

5 anggota Bakohumas yang aktif mengirimkan berita ke media *website* Bakohumas Provinsi Jawa Timur . Dari 5 anggota Bakohumas yang aktif adalah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lamongan. Temuan yang sudah didapat oleh peneliti, naskah berita dari 5 anggota Bakohumas yang aktif kemudian di Analisa 5W 1H masing-masing di ambil satu sampel naskah berita di pilih pada hari yang sama waktu pengirimannya yakni pada hari jum'at tanggal 4 januari 2019. Berikut hasil analisa 5W 1H adalah :

**a. Kabupaten Probolinggo**

Tanggal 4 januari 2019

Link Berita: <http://bakohumas.jatimprov.go.id/news/id/828>



Gambar 1.2 Berita Badan koordinasi wilayah V Jember memimpin Rapat koordinasi Penanggulangan Bencana Alam Tiris

**Bakorwil V Jember Memimpin Rakor Penanggulangan Bencana Alam Tiris**

**TIRIS** - Menindaklanjuti rapat koordinasi (rakor) dan kerja sama penanggulangan bencana alam banjir bandang pada Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember beberapa hari lalu, Jum'at (4/1/2019)



kembali dilaksanakan rapat koordinasi penanganan bencana alam di Kecamatan Tiris.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Bakorwil V Jember R Tjahjo Widodo yang dihadiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur. Dari Probolinggo hadir Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Supriadi, Asisten Administrasi Umum Anung Widiarto, Kepala Pelaksana BPBD Anggit Hermanuadi, Pabung Kodim 0820 Probolinggo Mayor Inf Ciptadi, perwakilan Polres Probolinggo, Forkopimka Tiris dan OPD yang ada di lingkungan Pemkab Probolinggo. Hasil rapat koordinasi tersebut diperoleh delapan kesimpulan.

*Pertama*, secepatnya melakukan tindakan normalisasi Sungai Pekalen. Akan tetapi karena Sungai Pekalen merupakan wewenang pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka akan diusulkan kepada Gubernur Jawa Timur. *Kedua*, untuk pemindahan rumah terdampak yang membutuhkan lahan untuk pembangunan rumah, Dinas Perhutani menyediakan lahan untuk rumah asal ada permintaan tertulis dari desa setempat. *Ketiga*, BP DAS BRANTAS Jawa Timur bersiap untuk memberikan bantuan penanaman pohon di sepanjang lereng Sungai Pekalen dan dapat segera dilaksanakan setelah menerima laporan dari kepala desa (kades) setempat wilayah yang perlu dilakukan penanaman kembali pohon yang hilang.

*Keempat*, PT PN XII telah memberikan tanggung jawab sosial perusahaan berupa pembuatan bronjong satu titik di sungai Lawang Kedaton dan masih bersedia akan membantu di lokasi lain yang diperlukan dan melakukan penanganan segera pembuatan plengsengan

pengamanan jalan kabupaten di Dusun Lawang Kedaton Desa Andungbiru pada dua titik lokasi banjir.

Karena kondisinya mengkhawatirkan terjadi longsor yang akan mengakibatkan putusnya jalan tersebut dan longsor dapat merusak beberapa rumah warga di bawah jalan tersebut. *Kelima*, permohonan pihak desa mengenai ketersediaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat, karena ada jalur pipa air bersih yang hilang terkena longsor tanah beberapa hari lalu. *Keenam*, Dinas Perhutani di musim penghujan tahun ini akan melaksanakan penanaman pohon-pohon keras pada titik rawan longsor guna pengamanan.

*Ketujuh*, jembatan darurat menuju Dusun Lawang Kedaton sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. *Kedelapan*, jembatan yang berada di perbatasan Probolinggo - Jember, sesuai gapura yang ada berada di Desa Gelang, Kabupaten Jember. Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut hasil rekomendasi dari rapat koordinasi yang dilakukan di ruang Bakorwil V Jember pada 20 Desember 2018 hari lalu.

sebagaimana pada rapat koordinasi pada hari lalu diperoleh 10 poin rekomendasi untuk program jangka pendek dan 6 poin rekomendasi untuk program jangka panjang. Rapat koordinasi untuk penanggulangan bencana alam banjir bandang di kawasan Gunung Gambir wilayah Kecamatan Tiris Kab. Probolinggo dan Kecamatan Sumberbaru Kecamatan Jember tersebut dihadiri Kepala Bakorwil V Jember R Tjahjo Widodo, Kepala BPBD Jawa Timur dan BPBD sewilayah Bakorwil V Jember meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo.

### **Hasil Analisa 5W+1H**

Judul : Badan koordinasi wilayah V Jember memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana alam Tiris

What : Rapat koordinasi (rakor) penanganan bencana alam banjir bandang

Who : Kepala Bakorwil V Jember R Tjahjo Widodo, dari Kabupaten Probolinggo Asisten Administrasi Pemerintahan Kesra Supriadi, Asisten Administrasi Umum Anung Widiarto, Kepala Pelaksana BPBD Anggit Hermanuadi, Pabung Kodim 0820 Probolinggo Mayor Inf Ciptadi, perwakilan Polres Probolinggo, dan Forkopimka Tiris

When : Jum'at 4 januari 2019

Where : di kecamatan Tiris kabupaten Probolinggo

Why : Badan koordinasi wilayah (Bakorwil) V Jember melaksanakan rakor untuk kerja sama guna untuk penanganan bencana alam banjir bandang.

How : Dari Hasil rapat koordinasi tersebut diperoleh delapan kesimpulan yang *Pertama*, secepatnya melakukan tindakan normalisasi Sungai Pekalen. Akan tetapi karena Sungai Pekalen merupakan wewenang pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka akan diusulkan kepada Gubernur Jawa Timut. *Kedua*, untuk pemindahan rumah terdampak yang membutuhkan lahan untuk pembangunan rumah, Dinas Perhutani menyediakan lahan untuk rumah asal ada permintaan tertulis dari desa setempat. *Ketiga*, BP DAS BRANTAS Jawa Timur bersiap untuk memberikan bantuan penanaman pohon di sepanjang lereng Sungai Pekalen dan dapat segera

dilaksanakan setelah menerima laporan dari kepala desa (kades) setempat wilayah yang perlu dilakukan penanaman kembali pohon yang hilang. *Keempat*, PT PN XII telah memberikan tanggung jawab sosial perusahaan berupa pembuatan bronjong satu titik di sungai Lawang Kedaton dan masih bersedia akan membantu di lokasi lain yang diperlukan dan melakukan penanganan segera pembuatan plensengan pengamanan jalan kabupaten di Dusun Lawang Kedaton Desa Andungbiru pada dua titik lokasi banjir. Karena kondisinya mengkhawatirkan terjadi longsor yang akan mengakibatkan putusnya jalan tersebut dan longoran dapat merusak beberapa rumah warga di bawah jalan tersebut. *Kelima*, permohonan pihak desa mengenai ketersediaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat, karena ada jalur pipa air bersih yang hilang terkena longoran tanah beberapa hari lalu. *Keenam*, Dinas Perhutani di musim penghujan tahun ini akan melaksanakan penanaman pohon-pohon keras pada titik rawan longsor guna pengamanan. *Ketujuh*, jembatan darurat menuju Dusun Lawang Kedaton sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. *Kedelapan*, jembatan yang berada di perbatasan Probolinggo - Jember, sesuai gapura yang ada berada di Desa Gelang, Kabupaten Jember.

Pemberitaan ini mengandung keterbukaan informasi publik dari humas Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menginformasikan terkait program pemerintah untuk penanggulangan bencana alam banjir

bandang. Program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah rapat koordinasi (Rakor) untuk penanganan banjir di kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Kesimpulan dari hasil rapat koordinasi (Rakor) diperoleh delapan poin penting untuk penanganan bencana alam banjir bandang.

#### **b. Kabupaten Pasuruan**

Tanggal 4 Januari 2019

Link Berita: <http://bakohumas.jatimprov.go.id/news/id/826>



Gambar 1.3 Berita Meminimalisir Resiko Bencana, KIM Kabupaten Pasuruan terus-menerus Informasikan Kesiapsiagaan Bencana Ke Warga

**Meminimalisir Resiko Bencana, KIM Kabupaten Pasuruan terus-menerus Informasikan Kesiapsiagaan Bencana Ke Warga**

Kelompok informasi masyarakat (KIM) adalah bagian dari agen informasi yang berkewajiban melaksanakan kegiatan penyebaran informasi serta mempromosikan potensi Desa kepada masyarakat, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Pasuruan ikut serta berpartisipasi aktif dalam meminimalisir resiko bencana hidrologi sirkulasi air yang berpotensi terjadi pada musim hujan. Baik yang dilakukan melalui publikasi informasi lewat *blog* maupun media sosial yang dikelola KIM.

Seperti yang dilakukan KIM Tretes Taman Wisata, Kecamatan Prigen; KIM Merah Putih, Kecamatan Beji; KIM Visit Pandaan, Kecamatan Pandaan dan KIM Giri Surya, Kecamatan Puspo. Pemantauan dilakukan di wilayah masing-masing kelompok informasi masyarakat, kemudian ditambahkan kedalam konten pemberitaan mengenai kebijakan kesiapsiagaan bencana oleh Pemerintah kabupaten Pasuruan, KIM dengan terus-menerus menginformasikan mengenai pentingnya makna sadar bencana yang harus diketahui oleh seluruh warga. Sehingga bisa meminimalisir resiko bencana pada musim hujan, baik bencana banjir, angin puting beliung dan bencana tanah longsor.

“Keterlibatan KIM dalam menyebarluaskan informasi tentang kesiapsiagaan bencana jelas sangat penting, terlebih daerah kami di Kecamatan Prigen juga termasuk kawasan rawan bencana. Selama ini kan di Tretes sering terjadi longsor dan banjir yang pernah menelan korban jiwa. Dua tahun lalu, ada pengunjung wisata Kakek Bodo terseret arus air bah dan kemudian ditemukan tewas. Sehingga papan-papan peringatan wajib ditempelkan di titik-titik rawan, khususnya tempat wisata”, menurut Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Tretes

Taman Wisata sekaligus Ketua Forum KIM Kabupaten Pasuruan, Hadi Sucipto.

Sementara itu Ketua KIM Merah Putih, Kecamatan Beji, Supriyadi menyebutkan bahwa ia dan sesama rekannya di Kelompok Informasi Masyarakat Merah Putih ikut serta bertanggungjawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Termasuk pemantauan terbaru kondisi cuaca serta lingkungan sekitar melalui media informasi *blog* dan media sosial.

“Informasi yang kami bagikan sebagai bentuk deteksi dini untuk antipasi resiko bencana. Dengan adanya informasi terkait perkembangan cuaca, masyarakat akan lebih siap untuk mengantisipasi sekaligus mengurangi resiko bencana. Sekecil apapun informasi akan sangat bermanfaat, khususnya untuk masyarakat di kawasan rawan bencana”, menurutnya ketika dikonfirmasi Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Jumat (4/1/2019).

Sedangkan, hasil pemetaan wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Pasuruan, ada sepuluh Kecamatan yang beresiko rawan bencana. Masing-masing, wilayah Gempol, Beji, Bangil, Kraton, Grati, Gondangwetan, Nguling, Rejoso, Pohjentrek dan wilayah Winongan. Diharapkan sangat diperlukan kesadaran seluruh masyarakat terhadap resiko terjadinya bencana pada musim hujan.

### **Hasil Analisa 5W+1H**

Judul : Meminimalisir resiko bencana, Kelompok Informasi Masyarakat kabupaten Paasuruan terus-menerus informasikan kesiapsiagaan bencana ke warga.

What : Meminimalisir antisipasi resiko bencana alam  
 Who : Kelompok informasi masyarakat (KIM) Kabupaten Pasuruan  
 When : Jum'at 4 Januari 2019  
 Where : Di Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Nguling, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Pohjentrek dan Kecamatan Winongan.

Why : Kelompok informasi masyarakat (KIM) adalah bagian dari agen informasi yang berkewajiban melaksanakan kegiatan penyebaran informasi serta mempromosikan potensi Desa kepada masyarakat, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Pasuruan ikut serta berpartisipasi aktif dalam meminimalisir resiko bencana hidrologi sirkulasi air yang berpotensi terjadi pada musim hujan. Baik yang dilakukan melalui publikasi informasi lewat *blog* maupun media sosial yang dikelola KIM.

How : KIM melakukan pemantauan pada wilayah masing-masing wilayahnya, kemudian hasil pemantaunnya ditambahkan kedalam konten pemberitaan mengenai kebijakan kesiapsiagaan bencana oleh Pemerintah kabupaten Pasuruan, KIM dengan terus-menerus menginformasikan mengenai pentingnya makna sadar bencana yang harus diketahui oleh seluruh warga. Sehingga bisa meminimalisir resiko bencana padda



musim hujan, baik bencana banjir, angin puting beliung dan bencana tanah longsor.

Pemberitaan di atas mengandung keterbukaan informasi publik dari humas Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pemberitaan ini tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait keterlibatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Pasuruan adalah bagian dari penyalur informasi yang berkewajiban melaksanakan kegiatan mempublikasikan informasi serta mensosialisasikan pada masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana alam yang akan terjadi.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pasuruan ikut serta berpartisipasi aktif untuk meminimalisir resiko bencana banjir yang berpotensi terjadi pada musim hujan. Bentuk pengaplikasian yang dilakukan KIM Kabupaten Pasuruan adalah deteksi dini untukantisipasi resiko bencana, seperti perkembangan cuaca yang buruk.

**c. Kabupaten Gresik**

Tanggal 4 januari 2019

Link Berita: <http://bakohumas.jatimprov.go.id/news/id/820>



Gambar 1.4 Berita Awali Aktivitas Tahun 2019 Dengan Istighotsah Qubro

### **Awali Aktivitas tahun 2019 Dengan Istighotsah Qubro**

Mengawali aktivitas tahun 2019, Jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan Istighotsah Qubro. Kegiatan yang diikuti oleh sekitar seribu jamaah ini dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Gresik, Rabu (2/1/2019).

Istighotsah Qubro ini diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Gresik serta puluhan ulama dan Kyai dari berbagai wilayah se Kabupaten Gresik.

Tampak hadir Seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gresik. Mereka yang turut mendampingi Wakil Bupati Gresik Dr. Muhammad Qosim yaitu Penjabat Sekda Gresik Nadhif, Ketua DPRD Gresik Nurhamim, Kapolres Gresik AKBP Wahyu S. Bintoro, Komandan Kodim 0817 Gresik Letnan Kolonel infantry Budi Handoko.

Mereka semuanya tampak khusuk membaca Sholawat Nabi serta memanjatkan doa dalam mengawali kegiatan Tahun baru 2019.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim menyatakan kebanggaan atas kegiatan Istighotsah Qubro dalam menyambut tahun baru 2019. Dia menyatakan kegiatan Istighotsah dan pembacaan sholawat ini sudah menjadi tradisi di seluruh wilayah Gresik.

“Hampir semua kegiatan di Gresik maupun di jajaran Pemkab Gresik, selalu dilaksanakan kegiatan Istighotsah seperti saat ini” kata Qosim.

Qosim juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Ulama dan masyarakat Gresik yang telah banyak membantu dan mendukung program pemerintah.

“Kita sebagai masyarakat Gresik harus bersyukur bahwa sampai saat ini Gresik tetap aman dan kondusif. Saya berterima kasih sekali kepada pak Kapolres dan pak Dandim” kata Wabup.

Qosim juga menyebut bahwa akhir-akhir ini banyak sekali terjadi bencana di Indonesia, tandasnya sambil menyebut beberapa bencana yang terjadi di Indonesia selama tahun 2018.

“Saya mengajak kepada kita semua untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita semua diberi keselamatan oleh Allah dan dijauhkan dari berbagai bencana. Dengan selalu berdoa, membaca sholawat dan Istighotsah. Semoga kita selalu menjadi orang yang dicintai Allah” urai Qosim saat memberi sambutan.

Pada kegiatan itu ada empat orang Kyai yang memimpin doa yaitu KH. Moh. Sholihan (Wringinanom), KH. Syueb Zunaidi (Benjeng), KH. Agus Abdul Latif (Ujungpangkah). KH. Muhsin Attamimi (Gresik). Turut memberikan ceramah KH. Khusnan Ali (Bungah) Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdhlatul Ulama (PCNU) Gresik.

Pada kesempatan itu Wabup Qosim serta Anggota Forkopimda Gresik juga menyerahkan santunan untuk anak yatim piatu dan kaum dhuafa. (sdm/edited by Diskominfo Kab. Gresik)

### **Hasil Analisa 5W+1H**

|       |  |
|-------|--|
| Judul | : Awali aktivitas tahun 2019 dengan istighosah qubro   |
| What  | : Istighosah qubro   |
| Who   | : Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah kabupaten Gresik serta para Ulama dan Kyai dari berbagai wilayah Kabupaten Gresik                                  |
| When  | : Rabu 2 januari 2019  |
| Where | : Dilaksanakan di halaman kantor Bupati Gresik   |
| Why   | : Untuk mengawali aktivitas 2019 jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan acara Istighosah Qubro dan doa bersama dalam menyambut tahun baru 2019   |
| How   | : Acara istighosah qubro yang di gelar Pemkab Gresik diberi sambutan dari Wakil Bupati Gresik Muhammad Qosim dan dilanjut sholawat nabi dan pembacaan doa dalam mengawali kegiatan tahun baru 2019 |

Pemberitaan di atas tidak mengandung keterbukaan informasi publik karena tidak mengandung kebijakan tentang pemerintahan pada

masyarakat Kabupaten Gresik. Pemberitaan di atas yang berjudul Awali Aktivitas Tahun 2019 dengan Istighosah Qubro sekedar kegiatan tahunan yang di selenggarakan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengawali tahun 2019.

Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim, dalam sambutannya mengatakan bangga kepada warganya untuk kegiatan Istighotsah Qubro dalam menyambut tahun 2019. Menurut wakil Bupati Gresik mengatakan kegiatan Istighotsah dan pembacaan sholawat ini sudah menjadi tradisi setiap tahun di wilayah Kabupaten Gresik.

**d. Kabupaten Ponorogo**

Tanggal 4 januari 2019

Link Berita: <http://bakohumas.jatimprov.go.id/news/id/829>



Gambar 1.5 Berita Jokowi Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf di Ponorogo

**Jokowi Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf Di Ponorogo**

Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden Joko Widodo ke Ponorogo, Jum'at (4/1) ada tiga agenda kunker yang pertama penyerahan sertifikat wakaf, meninjau proyek waduk bendo, dan penyerahan sertifikat tanah.

Penyerahan sertifikat tanah wakaf tersebut berlangsung di Masjid Ar Rahman, Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo. Ada 213 sertifikat tanah wakaf yang diserahkan Presiden Joko Widodo. Sertifikat tersebut diserahkan simbolis kepada pengurus sejumlah masjid, pondok pesantren, mushola atau surau yang berada di wilayah Jawa Timur.

Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menanyakan kepada para undangan “Mengapa sertifikat tanah wakaf untuk mushola atau surau, masjid, pondok pesantren,” tanya Presiden Jokowi.

Hal ini dilakukan untuk menghindari sengketa lahan. Karena setiap dirinya turun ke desa, dan kampung, hingga masuk masjid banyak yang mengasih informasi terkait banyaknya sengketa lahan.

“Oleh karena itu, kita mempercepat pengurusan sertifikat tanah wakaf dan pemerintah menyiapkan dana yang bersumber dari APBN untuk mengurusnya, jadi untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf tidak dipungut biaya di Kantor BPN,” ungkapnya.

Presiden Joko Widodo menceritakan salah satu persoalan tanah wakaf yang berada di Jakarta. Awal mulanya tanah wakaf tersebut tidak ada masalah, dan belakangan ini timbul persoalan terkait tanah wakaf tersebut.

“Dulu emang gak ada masalah, namun belakangan ini terjadi persoalan karena kawasan tersebut menjadi kawasan berkembang, dan

sekarangpun harga tanah disana mencapai Rp 120 juta per meternya, oleh karena itu ahli waris mulai ngotak ngatik tanah wakaf tersebut” ceritanya.

Persoalan tersebut gak terjadi di Jakarta saja, namun juga terjadi di daerah lain di Indonesia.

Dalam kungkernya di Ponorogo Presiden Joko Widodo di dampingi oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hasimuljono, Gubernur Jatim Soekarwo dan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni. (Kominfo/fdl)

### **Hasil Analisa 5W+1H**

Judul :Jokowi serahkan sertifikat tanah wakaf di Ponorogo  
What : Penyerahan sertifikat wakaf  
Who : Presiden Jokowi Widodo  
When : Jum’at 4 januari 2019  
Where : Di masjid Ar Rahman desa Prayungan kecamatan Sawo kabupaten Ponorogo.  
Why : Penyerahan sertifikat tanah wakaf yang dilakukan untuk menghindari sengketa lahan.  
How :Penerimaan sertifikat tanah wakaf dilakukan di Masjid Ar Rahman, Desa Prayungan, Kecamatan Sawo. Penyerahan sertifikat tanah wakaf sebanyak 213 sertifikat yang diserahkan Presiden Joko Widodo. Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis

kepada pengurus takmir masjid, pengurus pondok pesantren, dan pengurus mushola.

Pemberitaan dari humas Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang berjudul presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah wakaf di Ponorogo, penyerahan sertifikat dilakukan dalam rangka kunjungan kerja Presiden, pemberitaan ini mengandung keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo. Sertifikat tanah yang diberikan Presiden Jokowi diserahkan kepada pengurus takmir masjid, pengurus pondok pesantren, pengurus mushola yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. penyerahan sertifikat tanah yang dilakukan untuk menghindari sengketa lahan. Dalam kunjungan kerja (Kunker) Presiden Jokowi menyebutkan akan memudahkan pengurusan sertifikat tanah wakaf sosialisasi pemerintah pusat sudah menyiapkan dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana pengurusan sertifikat, jadi dalam mengurus sertifikat tanah wakaf tidak dipungut biaya di kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN).

**e. Kabupaten Lumajang**

Tanggal 4 januari 2019

Link Berita: <http://bakohumas.jatimprov.go.id/news/id/824>





Gambar 1.6 Berita Pemkab Lumajang berkomitmen Lakukan Pembaharuan Birokrasi untuk Tingkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara

## **Pemkab Lumajang Berkomitmen Lakukan Pembaharuan Birokrasi untuk Tingkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lumajang**

Bupati serta Wakil Bupati Lumajang berkomitmen melakukan pembaharuan birokrasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.

Menurut Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah) pada saat melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada kegiatan senam pagi di Alun-alun Lumajang , (hari Jumat tanggal 04 Januari 2019).

Tujuan Inspeksi Mendadak menurut Bunda Indah perlu dilakukan untuk melihat kinerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten Lumajang. Sementara itu selama 100 hari kerja

pemerintahan yang baru, pihaknya berkomitmen memperbaiki kinerja Aparatur Sipil Negara supaya bisa bekerja lebih profesional dan berintegritas.

“Ini penting buat kami, saya dan pak Bupati, kami akan konsisten dengan janji - janji yang sudah kami sampaikan ketika masa kampanye dulu, karena seorang pemimpin itu dihargai oleh orang, dilihat dari komitmennya. Reformasi birokrasi yang saya dan Pak Bupati lakukan sangat berat karena harus merubah mindset mainstream ASN,” ujar Bunda Indah.

Pokok utama yang menjadi perhatian Bunda Indah yaitu tingkat kedisiplinan ASN. Untuk itu Bupati dan Wakil Bupati akan menerapkan aplikasi presensi berbasis android yang bernama “SIPERLU”, supaya bisa mengabsen dan mengontrol kedisiplinan ASN di Kabupaten Lumajang.

“SIPERLU akan segera disempurnakan, saya sudah meminta konsultan ITS untuk membuat fitur dan konsultan pihak ketiga untuk menyempurnakan SIPERLU, saya meminta presensi kalau bisa memakai fitur wajah dan muncul titik koordinat lokasi dimana dia absen dan waktu absennya,” ujar Bunda Indah.

Bunda Indah menilai bahwa pembaruan kinerja ASN diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab Aparatur Sipil Negara yang bertugas melayani masyarakat. Ia berharap seluruh jajaran ASN di bawahnya supaya bisa bekerja sesuai tugas dan fungsi dan menghindari praktek-praktek penyelewengan.

“Saya tidak mau korps ini (KORPRI,red) dibicarakan banyak orang dan berpandangan negatif, saya akan mengembalikan korps yang dianggap negatif ini menjadi korps yang positif di mata masyarakat.”

### **Hasil Analisa 5W+1H**

**Judul** :Pekab Lumajang berkomitmen lakukan pembaharuan birokrasi untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di Lumajang

**What** : Pembaharuan birokrasi Aparatur Sipil Negara di pemerintahan kabupaten Lumajang

**Who** : Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah)

**When** : Jum’at 4 januari 2019

**Where** : Di Alun-alun Lumajang

**Why** :Menurut Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) akan berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Lumajang dalam meningkatkan kinerja ASN di pemerintahan Kabupaten Lumajang.

**How** :Pokok utama yang menjadi perhatian Bunda Indah yaitu tingkat kedisiplinan ASN. Untuk itu Bupati dan Wakil Bupati akan menerapkan aplikasi presensi berbasis android yang bernama “SIPERLU”, supaya bisa mengabsen dan mengontrol kedisipilinan ASN di Kabupaten Lumajang. “SIPERLU akan segera disempurnakan, saya sudah meminta konsultan ITS untuk membuat fitur dan konsultan pihak ketiga untuk menyempurnakan SIPERLU, saya meminta presensi

kalau bisa memakai fitur wajah dan muncul titik koordinat lokasi dimana dia absen dan waktu absennya.”

Pemberitaan dari Humas Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berjudul Pemkab Lumajang Berkomitmen Lakukan Pembaharuan Birokrasi untuk Tingkatkan Kinerja ASN di Lumajang. Pemberitaan ini mengandung keterbukaan informasi publik karena menginformasikan tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melakukan program Pemerintah merevolusi birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara supaya bisa bekerja secara profesional dan bertanggungjawab. Wakil Bupati Indah Amperawati dalam sambutannya hal utama yang menjadi perhatian yaitu pada hal kedisiplinan Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menerapkan aplikasi presensi berbasis android yang dinamai “SIPERLU”, supaya bisa mengabsen dan mengontrol kedisiplinan ASN di Lumajang. Bupati dan Wakil Bupati Lumajang menilai perbaikan untuk kinerja ASN sangat perlu dilakukan sebagai tugas dan tanggung jawab ASN untuk melayani masyarakat. Bunda Indah berharap kepada seluruh jajaran ASN di bawahnya agar bekerja sesuai tugas dan fungsi dan menghindari praktek-praktek penyelewengan.

### c. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara Bakohumas Provinsi Jawa Timur adalah lembaga non-struktural badan publik pemerintah yang merupakan forum koordinasi dan kerjasama antar humas lembaga pemerintah. Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Jawa Timur adalah organisasi di dalam lembaga pemerintah yang diketuai oleh Dr. Ardo Sahak, S.E, M.M Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. seperti yang dikatakan Eko Setiawan M.Med.Kom selaku ketua bidang Komunikasi Publik:

“Organisasi Bakohumas Provinsi Jawa Timur di pimpin oleh Bpk Ardo Sahak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan beranggotakan seluruh OPD (organisasi pemerintah daerah) dilingkungan Provinsi Jawa Timur ditambah BUMN, BUMD dan instansi fertikal seperti kementerian agama dan kementerian keuangan pertemuan rutin cukup dilaksanakan, Bakohumas Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan peningkatan kompetensi anggota seperti workshop dan alin-lain”.<sup>1</sup>

Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Timur berada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang di dalamnya terdapat Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas). Tugas dan fungsi Bakohumas memberikan informasi kebijakan publik dan melakukan koordinasi antar anggota Bakohumas, seperti yang dikatakan Eko Setiawan, selaku pengurus pemberitaan Bakohumas Probinsi Jawa Timur adalah:

“Bakohumas itu adalah suatu wadah bersama sebagai forum komunikasi antar humas ditingkatan pemerintah Provinsi maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilingkungan Provinsi Jawa Timur juga anggota di instansi fertikal seperti kementerian agama, kementerian keuangan dll. Dan bentuk koordinasi Bakohumas yakni mengadakan pertemuan rutin sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali antar anggota Bakohumas juga lewat media

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Bpk Eko Setiawan, selaku pengurus pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, 1 Juli 2019

lain seperti media sosial guna untuk saling berkomunikasi antar anggota Bakohumas. Bakohumas sementara hanya ada di Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang berkoordinasi dengan BUMN, BUMD juga OPD perangkat daerah”.<sup>2</sup>

Peran Bakohumas Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik (*Government public relation*) dan mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di era keterbukaan informasi dan teknologi informasi sekarang ini. Bakohumas Provinsi Jawa Timur membangun keterbukaan informasi publik dengan cara mendorong serta mensupport anggota Bakohumas untuk aktif dalam menginformasikan kebijakan publik. Seperti yang dikatakan Eko Setiawan, selaku pengurus pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur adalah:

“Peranan Bakohumas dalam pemerintahan Provinsi Jawa Timur yaitu lebih banyak publikasi informasi tentang kegiatan pemerintahan baik itu pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bakohumas Provinsi Jawa Timur mensupport anggotanya lewat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di instansi pemerintah yang termasuk anggota Bakohumas untuk terbuka dalam informasi publik seperti informasi di website dan informasi-informasi publik yang serta merta harus ada dipublikasikan di media masing-masing anggota Bakohumas dengan kriteria informasi yang wajib dan tidak wajib di umumkan mengacu kepada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).”<sup>3</sup>

Informasi publik yang dilakukan Bakohumas Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan media informasi untuk publikasi pemberitaan dari anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur sebagaimana disampaikan oleh Eko Setiawan:

“Proses penyampaian informasi yang dilakukan yakni melalui media seperti website pemberitaan Bakohumas dengan alamat website “bakohumas.jatimpemrov.go.id”, twitter dengan nama “@bakohumas jatim”, dan facebook dengan nama “bakohumas jatim” media yang

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Eko Setiawan, selaku pengurus pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, 1 Juli 2019

<sup>3</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Eko Setiawan, selaku pengurus pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, 1 Juli 2019

dimiliki Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang bisa di akses oleh publik masyarakat”.<sup>4</sup>

Transparansi informasi yang dilakukan Bakohumas Provinsi Jawa Timur cukup baik dalam membangun keterbukaan informasi publik dengan presentase diatas 50% meskipun tidak semua anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang berada di instansi pemerintah daerah aktif dalam memberikan pemberitaan informasi kebijakan publik pemerintah. Akan tetapi masih ada anggota Badan Koodinasi Humas Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang cukup aktif dan juga terbuka dalam hal memberikan informasi publik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Eko Setiawan, adalah:

“Transparansi informasi Bakohumas cukup baik. Anggota Bakohumas cukup aktif memberikan informasi meskipun tidak aktif 100% tetapi cukup aktif di atas 50% dalam memberikan informasi di media bakohumas provinsi jawa timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun lalu masuk dalam 10 besar institusi terbaik dalam mengaplikasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik bahkan beberapa tahun sebelumnya sempat juara 1 juga juara 2 dalam implementasi UU KIP. Artinya transparansi informasi Bakohumas Provinsi Jawa Timur cukup baik karena penilaiannya juga positif dari Komisi Informasi Pusat di Jakarta”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Eko Setiawan, selaku pengurus pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, 1 Juli 2019

<sup>5</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Eko Setiawan, selaku pengurus pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, 1 Juli 2019

### **C. Pembahasan**

#### **a. Peran Bakohumas Provinsi Jawa Timur dalam Membangun Keterbukaan Informasi Publik**

Dari keseluruhan data yang diperoleh peneliti berdasarkan wawancara dan observasi telah menunjukkan cukup banyak informasi yang diperoleh dan penting untuk diketahui sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis lima pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur, empat pemberitaan dari humas pemerintah kabupaten Probolinggo, humas pemerintah kabupaten Pasuruan, humas pemerintah kabupaten Ponorogo, dan humas pemerintah kabupaten Lumajang pemberitaannya mengandung keterbukaan informasi publik, yang menginformasikan tentang kebijakan pemerintah terkait kepentingan publik. Sedangkan satu dari lima pemberitaan yang dianalisis yaitu dari humas pemerintah kabupaten Gresik tidak mengandung keterbukaan informasi publik dan kebijakan pemerintah, pemberitaannya hanya memuat kegiatan tahunan yang di selenggarakan Pemkab Gresik. Gambaran mengenai hasil analisis berdasarkan rumusan masalah penelitian dapat memberikan gambaran mengenai Peran Bakohumas Jawa Timur dalam Membangun Keterbukaan Informasi Publik dapat diinterpretasikan perannya yaitu:

Bakohumas Provinsi Jawa Timur memiliki tugas untuk menjalankan fungsi kehumasan pemerintah dan menyebarkan informasi publik di wilayah Provinsi Jawa Timur. dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bakohumas Provinsi Jawa Timur mengacu kepada Pergub Prov. Jawa Timur nomor 25 tahun 2017 mengenai Bakohumas Jawa Timur yang telah ditetapkan pada peraturan tersebut.

Bakohumas Provinsi Jawa Timur juga menggunakan strategi *media relations* untuk membangun keterbukaan informasi publik yang meliputi proses mengelola relasi, mengembangkan strategi, dan mengembangkan jaringan sebagai berikut:



## 1. Mengelola relasi

Mengelola relasi untuk menjalin relasi bersama media informasi dan publik/ masyarakat, dengan adanya hubungan yang baik pada media informasi dan publik yang ada pada badan publik Bakohumas Provinsi Jawa Timur, maka akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur dalam pemberitaan di media informasi seperti website Pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur, karena media informasi butuh informasi dari badan publik seperti Bakohumas Jawa Timur sedangkan Bakohumas Jawa Timur membutuhkan sarana untuk mempublikasikan informasi publik. Untuk menjaga hubungan yang baik dengan media informasi yang ada serta terutama dengan wartawan daerah sebagai awak media, pihak Bakohumas Provinsi Jawa Timur melakukannya dengan cara kerjasama dan berkomunikasi secara intens dengan jurnalis atau wartawan. Menurut ketua seksi komunikasi publik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur Eko Setiawan S.I.Kom, M.Med.Kom, hampir setiap hari pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur menjalin komunikasi dan memberikan informasi publik seputar pemerintahan di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan berkomunikasi dan menjalin relasi bersama media diharapkan agar badan publik pemerintah dapat memberikan hak kepada publik/ masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah, dan juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah. Karena inti dari badan publik pemerintah adalah berkomunikasi memberikan informasi publik kepada masyarakat, maka menjalin hubungan komunikasi yang baik menjadi penting untuk menunjang kegiatan badan publik pemerintahan.

Keberhasilan program kebijakan pemerintah seringkali didasarkan pada pemberitaan yang disiarkan media informasi. Tentunya

anggapan ini didasarkan bahwa dengan adanya pemberitaan di media informasi maka informasi dapat disebarluaskan di masyarakat. Akan tetapi hambatan dan masalah yang terjadi di dalam pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur, anggota Bakohumas Jawa Timur banyak yang tidak aktif dalam memberikan informasi serta kurang sandar akan pentingnya keterbukaan informasi publik, sedangkan hanya beberapa anggota Bakohumas Jawa Timur yang cukup aktif dan terbuka dalam memberikan informasi publik pada website pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur.

Seiring perkembangan Provinsi Jawa Timur, anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur terus bertambah dan selalu berkembang, tetapi badan publik pemerintah di Provinsi Jawa Timur kurang optimal dalam menerapkan keterbukaan informasi hal itu terjadi di website pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur perlu ditingkatkannya koordinasi antar humas pemerintah. Hal yang penting perlu adalah menjalin hubungan koordinasi dan kerjasama yang saling membutuhkan informasi publik agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik tentu saja mesti ada komunikasi yang cukup intens di antara humas pemerintah jawa timur yang berkenaan dengan tugas humas pemerintah dalam memberikan informasi.

## 2. Mengembangkan strategi

Mengembangkan strategi untuk menjalin hubungan yang baik dengan publik seperti di media website pemberitaan bakohumas provinsi jawa timur, mengembangkan strategi dengan cara melakukan strategi *media relations* dalam menerapkan strategi *media relations*, mengembangkan strategi menjadi sangat penting bagi badan publik seperti Bakohumas. Strategi *media relations* sebagai cara yang akan melahirkan dasar-dasar kegiatan yang bisa dilakukan dalam mencapai tujuan dari instansi atau badan publik pemerintah.

Bakohumas Provinsi Jawa Timur menggunakan sarana media yang ada untuk mempublikasikan informasi kepada masyarakat. Media yang digunakan adalah media *website*, media sosial seperti twitter dan facebook. Bakohumas Provinsi Jawa Timur juga bekerjasama dengan media massa, Bakohumas Provinsi Jawa Timur melakukannya melalui pertemuan-pertemuan dengan pihak media terutama jurnalis atau wartawan, kerjasama dengan media dalam bidang publikasi. Dalam memberikan informasi kepada publik atau masyarakat, pihak badan publik melalui Bakohumas Provinsi Jawa Timur selalu memberikan informasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa timur.

Strategi tersebut diharapkan bisa membuat hubungan media dengan publik terjalin dengan baik dan diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi. Karena media merupakan salah satu sarana bagi Bakohumas Provinsi Jawa Timur untuk melakukan publikasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan juga karena media bisa menciptakan citra yang baik terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

### 3. Mengembangkan jaringan

Proses selanjutnya adalah mengembangkan jaringan. Pengembangan jaringan merupakan aspek pokok dalam *media relations* sebuah organisasi badan publik seperti Bakohumas. Untuk mengembangkan jaringan dengan cara menjalin kerjasama antar humas pemerintah untuk saling memberikan informasi publik serta mengembangkan jaringan bekerjasama dengan profesi kewartawanan yang ada di daerah dan di kota Provinsi Jawa Timur.

Mengembangkan jaringan juga penting, karena dengan adanya jaringan dapat digunakan sebagai modal sosial yang akan mendukung untuk mencapai keberhasilan pada badan publik pemerintahan. Mengembangkan jaringan juga menjadi begitu penting karena dengan jaringan yang cukup banyak maka akan mempermudah badan publik

tersebut untuk saling bertukar informasi. Untuk mengembangkan jaringan, Bakohumas Provinsi Jawa Timur berhubungan dengan anggotanya dan juga dengan organisasi profesi kewartawanan.

Bakohumas sebagai wadah kehumasan pemerintah di Provinsi Jawa Timur dalam hubungan tersebut humas pemerintah mendapatkan banyak manfaat, diantaranya adalah dapat bertukar informasi dan bertukar pikiran dengan humas pemerintah dari daerah/kabupaten.

**b. Koordinasi Bakohumas Provinsi Jawa Timur dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik**

Undang-undang keterbukaan informasi publik No. 14 tahun 2018 sangat penting untuk memenuhi hak publik/ masyarakat di wilayah provinsi jawa timur untuk memperoleh informasi publik. Penerapan keterbukaan informasi publik melalui badan publik pemerintah Bakohumas Jawa Timur diharapkan dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik sehingga akan memicu partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik di Provinsi Jawa Timur. partisipasi aktif masyarakat pada waktunya akan meningkatkan akuntabilitas badan publik pemerintah.

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk pengawasan kebijakan publik pemerintah di Provinsi Jawa Timur selaras dengan pemerintahan terbuka (*Open Government*) yang dilaksanakan dalam prinsip transparansi, prinsip partisipasi, dan prinsip akuntabilitas. Pemerintahan terbuka membutuhkan keterlibatan publik/ masyarakat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di Jawa Timur, dengan demikian implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik akan lebih meningkatkan pemerintahan terbuka di Provinsi Jawa Timur.

Akan tetapi bahwa implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di yang diterapkan Bakohumas Provinsi Jawa Timur belum optimal. Belum optimalnya penerapan keterbukaan informasi publik tampak dari sedikitnya badan publik pemerintah di Provinsi Jawa

Timur yang memberikan informasi, dari jumlah anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 183 anggota. Berdasarkan hasil penelitian hanya beberapa anggota Bakohumas yang aktif memberikan informasi dan banyak dari anggota Bakohumas yang tidak aktif dalam memberikan informasi bisa dilihat dari pemberitaan Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang di muat di website. Hambatan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik yang diterapkan badan publik pemerintah Bakohumas Provinsi Jawa Timur adalah kurangnya koordinasi antar anggota bakohumas serta keterbatasan dana yang ada untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di provinsi jawa timur. Bentuk koordinasi yang dilakukan Bakohumas adalah dengan cara mengadakan pertemuan rutin antar anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan sekitar 2 atau 3 bulan sekali yang disebut Forum Bakohumas, serta bentuk koordinasi lain Bakohumas Provinsi Jawa Timur yang dilakukan lewat media sosial seperti whatsapp, facebook dan e-mail agar memudahkan untuk saling berkomunikasi antar anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur.

**c. Bakohumas dan Pembentukan Keterbukaan Informasi Publik**

Pembentukan keterbukaan informasi publik penting bagi badan publik pemerintah provinsi jawa timur adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah terjalannya komunikasi yang harmonis antara badan publik pemerintahan dan masyarakat. Sehingga menjadi sebuah keharusan sebuah pemerintah memiliki media informasi yang efektif seperti badan koordinasi kehumasan pemerintah agar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dapat terlayani dengan baik.

Badan kehumasan pemerintah memiliki fungsi utama yaitu memberikan informasi kepada publik/ masyarakat yang berkaitan dengan kinerja, kebijakan, dan program pemerintah serta menerima informasi dan menghimpun aspirasi dari masyarakat sebagai masukan untuk penyusunan

kebijakan bagi masyarakat. Peran Bakohumas adalah memberikan pelayanan dan mengembangkan profesi kehumasan pemerintah, meningkatkan fungsi humas pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah. Serta menjalin hubungan kerjasama yang baik dan efektif, serta memelihara hubungan yang harmonis dengan instansi pemerintah dan menjalin hubungan dengan publik/ masyarakat.

Badan publik pemerintah Bakohumas Provinsi Jawa Timur adalah wadah bersama dalam humas pemerintahan sebagai forum komunikasi antar humas ditingkatan pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun humas ditingkatan pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Umum Milik Negara (BUMN) dan Badan Umum Milik Daerah (BUMD) di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Bentuk koordinasi Bakohumas yaitu dengan mengadakan koordinasi dan kerjasama serta mengadakan pertemuan rutin bulanan yang dilaksanakan sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali untuk menjalin dan menjaga hubungan yang harmonis antar badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Bentuk koordinasi lain adalah dengan memakai alat media sosial agar memudahkan untuk saling berkomunikasi antar anggota bakohumas jawa timur.

Peran bakohumas jawa timur dalam membangun keterbukaan informasi publik adalah dengan cara mensupport anggota Bakohumas lewat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di instansi pemerintah yang berada di wilayah kabupaten/ kota yang bertujuan untuk terbuka dalam informasi publik seperti informasi di *website* atau media sosial, dari informasi-informasi publik yang serta merta harus dipublikasikan guna memenuhi hak masyarakat untuk mendapat informasi tentang kebijakan pemerintahan. Proses penyampaian informasi yang dilakukan Bakohumas Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi hak publik masyarakat adalah melalui media *website* bakohumas, majalah internal, dan media sosial yang

dimiliki seperti twitter dan facebook yang dapat di akses oleh publik masyarakat. Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) yang telah dilakukan Bakohumas Provinsi Jawa Timur adalah dengan cara mendorong serta mensuport anggota Bakohumas yang berada di daerah Kabupaten/Kota lewat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) instansi pemerintah untuk terbuka dalam memberikan informasi publik.